

TUGAS AKHIR

KAJIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Strata Satu (S1)

oleh :

Arie Ramadhan Wijaya

103060019



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2018**

ABSTRAK

Perkembangan penduduk kota – kota di Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius, diantaranya tumbuh kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah merupakan suatu kondisi kawasan permukiman yang tata letak bangunannya tidak teratur, halamannya yang sempit dan bahkan langsung berbatasan dengan jalan, bangunan yang berdempet serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan aspek sosial, permukiman kumuh ditandai dengan penambahan penduduk yang tinggi, tingkat pendapatan dan kesehatan yang rendah.

Seperti kota lainnya di Indonesia, Kota Bandung menjadi salah satu yang terpengaruh oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan di semua sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipacu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota yang merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik. Berdasarkan Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan (Penyusunan Program Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan), teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung berada di 442 RW yang tersebar di 33 kecamatan. Berdasarkan hasil kajian yang ada, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota Nomor 648/Kep.236-distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman kumuh di Kota Bandung, dimana Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong menjadi salah satu yang termasuk ke dalam SK Walikota tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Kota Bandung, agar dapat merumuskan penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik kekumuhannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Deskriptif kualitatif, dan deskriptif kuantitatif (menggunakan tabulasi skoring) dengan melihat indikator kekumuhan, dan tipologi kekumuhan, serta perumusan penanganan.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian lokasi blok permukiman di Kelurahan Babakan Surabaya memiliki tingkat kekumuhan sedang, dengan pola penanganan yang akan dilakukan dengan cara peremajaan dan juga permukiman kembali. hal ini disebabkan karena pada lokasi tersebut terdapat tanah yang memiliki status legal dan juga illegal, model yang dapat dipergunakan dalam penanganan permukiman kumuh di Blok Permukiman ada dua strategi. Dimana strategi ini dipilih dengan kesesuaian antara kondisi eksisting dan kriteria atau parameter berlaku, program ini dipilih dengan dua turunan yaitu land sharing untuk kawasan dengan status lahan pribadi dan land consoladition untuk kawasan dengan status lahan negara.

Kata kunci : Perkembangan Penduduk, Permukiman Kumuh, Penanganan

ABSTRACT

The development of urban populations in Indonesia both as a result of population growth and as a result of urbanization has given indications of a serious urban problem, including growing slums. Slum settlement is a condition of settlement area whose layout is irregular, narrow yard and even directly adjacent to road, attached building and inadequate facilities and infrastructures. On the social side, slums are characterized by high population growth, low levels of income and health.

Like other cities in Indonesia, the city of Bandung became one that was affected by population growth (human) due to urbanization, especially the settlers who eventually settled. Growth in all sectors of urban environmental development is due to a wave of urbanization spurred by the physical development of urban facilities and infrastructure that is both an attraction and a boost for citizens who want to gain better life opportunities. Based on Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan (Penyusunan Program Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan), the slum areas in Bandung are identified in 442 RW spread over 33 districts. Based on the results of the existing study, the Government of Bandung City has determined the location of slums through the Decree of the SK Walikota Number 648 / Kep.286-distarcip / 2015 on the Determination of the Location of Housing and Slum Neighborhoods in Bandung, where Babakan Village Kiaracondong District became one of into the mayor's decree.

The purpose of this study is to serve as an input in the planning of slum settlements in urban areas of Bandung City, in order to formulate appropriate handling in accordance with characteristics kekumuhannya. The method used in this research is using qualitative descriptive analysis, and quantitative descriptive (using scoring tabulation) by looking at slum indicator, and typology of slum, and formulation of handling.

The result of this research is part of location of block of settlement in Babakan Village Surabaya has medium slum level, with handling pattern which will be done by way of rejuvenation and also resettlement. this is because in that location there are land that have legal status and also illegal, model which can be used in handling slum settlement in Blok Settlement there are two strategy. Where this strategy is chosen with the suitability between existing conditions and criteria or parameters apply, the program is selected with two derivatives namely land sharing for the area with private land status and land consoladition for the area with the status of state land.

Keywords: Population Development, Slum Resettlement, Handling

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil aalamiin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta nikmat sehat kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, tidak lupa sholawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Baginda tercinta Rasulullah SAW.

Laporan yang telah penulis selesaikan berjudul **"Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong"**. Laporan ini diajukan syarat akhir untuk menyelesaikan pendidikan tahap Sarjana Strata-1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir dan juga bimbingan, arahan, sanggahan dalam penyelesaian laporan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bapak DR. Firmansyah, Ir., MT., selaku pembimbing utama dan koordinator Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan serta masukkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
2. Bapak Ir. Jajan Rohjan.,MT, selaku Co-pembimbing yang memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
3. Bapak Reza M. Surdia, Ir., MT., selaku Ketua Prodi Teknik Planologi Universitas Pasundan;
4. Segenap dosen dan staf di Jurusan Teknik Planologi yang merupakan tempat selama ini menuntut ilmu;
5. Kedua orang tuaku, adik-adikku serta calon istriku yang selalu mendo'akan dengan tulus dan ikhlas serta memberikan bantuan baik moral dan material pada penulis;

6. Bapak dan Ibu di Kelurahan Babakan Surabaya, terimakasih telah mempermudah dan sangat membantu dalam pengambilan data;
7. Segenap teman – teman mahasiswa Planologi angkatan 2010, kakak-kakak dan adik-adik tingkat mahasiswa Planologi UNPAS;
8. Serta pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.

Dengan segala keterbatasan kemampuan, penyusun menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dalam penyusunan laporan penelitian selanjutnya dan bagi yang akan menjalankan Tugas Akhir.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Bandung, September 2017

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAKS	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.3.1 Tujuan.....	5
1.3.2 Sasaran.....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Substansi.....	9
1.5 Batasan Studi.....	10
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.6.1 Metode Pendekatan.....	11
1.6.2 Metode Pengumpulan Data.....	11
1.6.3 Metode Analisis.....	13
1.6.4 Kerangka Pikir.....	15
1.7 Sistematika Penyusunan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 17
2.1 Pengertian Permukiman Kumuh.....	17
2.1.1 Definisi Permukiman dan Perumahan.....	17
2.1.2 Definisi Kawasan Permukiman.....	34
2.1.3 Definisi Permukiman Kumuh.....	35
2.1.4 Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh.....	35
2.1.5 Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh.....	38
2.2 Permukiman Kumuh Dalam Konteks Pembangunan Perkotaan....	39
2.2.1 Faktor Penyebab Kemunculan Permukiman Kumuh.....	39
2.2.2 Dampak Permukiman Kumuh.....	41
2.3 Urgensi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan.....	42
2.4 Model Penentuan dan Penanganan Permukiman Kumuh.....	45
2.4.1 Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh.....	45
2.4.2 Pendekatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh...	60
2.5 Keterkaitan Teori dengan pedoman identifikasi	

permukiman kumuh	73
2.6 Kajian Terdahulu.....	80

BAB II GAMBARAN UMUM 99

3.1 Gambaran Umum Kebijakan tentang Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.....	99
3.2 Gambaran Umum Wilayah Kota Bandung	101
3.2.1 Kondisi Geografis dan Topografi.....	101
3.2.2 Iklim	103
3.2.3 Topografi.....	103
3.2.4 Penggunaan Lahan Kota Bandung	104
3.2.5 Kepadatan Kota Bandung	105
3.2.6 Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bandung.....	107
3.3 Gambaran Umum Kecamatan Kiaracondong	110
3.3.1 Karakteristik Fisik dan Geografis Kecamatan Kiaracondong	110
3.3.2 Kependudukan dan Perekonomian Kecamatan Kiaracondong	111
3.4 Gambaran Umum Kelurahan Babakan Surabaya	116
3.4.1 Kependudukan dan Kondisi Fisik Kelurahan Babakan Surabaya.....	116
3.4.2 Kondisi Bangunan Gedung	134
3.4.3 Kondisi Jalan Lingkungan.....	139
3.4.4 Kondisi Penyediaan Air Minum.....	142

3.4.5	Kondisi Drainase Lingkungan.....	146
3.4.6	Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	151
3.4.7	Kondisi Pengelolaan Persampahan	155
3.4.8	Sarana dan Prasarana Alat Proteksi Kebakaran	160
3.4.9	Legalitas Bangunan.....	162
BAB IV ANALISIS		165
4.1	Penilaian Lokasi Blok Permukiman Kumuh Kelurahan Babakan Surabaya.....	167
4.2	Klasifikasi Blok Permukiman Kumuh	168
4.3	Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Blok Permukiman	172
4.4	Profil Lokasi Prioritas Terpilih	179
4.5	Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Blok 7-3 (Sub Blok 7-3 A & 7-3 B).....	187
BAB IV KESIMPULAN & REKOMENDASI.....		190
5.1	Kesimpulan	190
5.2	Rekomendasi.....	191
5.3	Kelemahan Studi	192
5.4	Studi Lanjutan	192

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Formulasi Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh	17
Tabel I.2	Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh.....	29
Tabel II.1	Prioritas Kebutuhan Berdasarkan Tipe Masyarakat Miskin	44
Tabel II.2	Formulasi Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh	46
Tabel II.3	Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh.....	58
Tabel II.4	Pola Penanganan Berdasarkan Tipologi Permukiman Kumuh	61
Tabel II.5	Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	67
Tabel II.6	Matrik keterkaitan pedoman (Peraturan Menteri No 2 Tahun 2016) dengan teori pendukung dalam penentuan tipologi kekumuhan	73
Tabel II.7	Hasil Kajian Studi Terdahulu dengan Kajian Studi	80
Tabel III.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017.....	102
Tabel III.2	Klasifikasi Kemiringan Kota Bandung	103
Tabel III.3	Penggunaan Lahan Kota Bandung	104
Tabel III.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bandung	106
Tabel III.5	Sebaran Permukiman Kumuh Kota Bandung	107
Tabel III.6	Jumlah Penduduk & Kepadatan Penduduk Kecamatan Kiaracandong Tahun 2016.....	111
Tabel III.7	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kiaracandong Tahun 2016.....	113
Tabel III.8	Kondisi Permukiman Per RW di Kelurahan Babakan Surabaya ...	118
Tabel III.9	Kelas Interval Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong Tahun 2107.....	124
Tabel III.10	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di	

Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracundong Tahun 2107.....	124
Tabel III.11 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracundong Tahun 2107.....	125
Tabel III.12 Klasifikasi Pola Ruang/Zona dan Sub Zona SWK Karees	127
Tabel III.13 Zona Pola Ruang di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracundong	128
Tabel III.14 Kondisi Eksisting Pola Ruang di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracundong	129
Tabel III.15 Kelas Interval Kondisi Dan Jumlah Bangunan di Lokasi Blok Permukiman Kelurahan Babakan Surabaya	134
Tabel III.16 Kondisi Dan Jumlah Bangunan di Lokasi Blok Permukiman Kelurahan Babakan Surabaya	134
Tabel III.17 Kondisi Bangunan di Lokasi Blok Permukiman Kelurahan Babakan Surabaya	135
Tabel III.18 Kondisi Jalan Lingkungan di Lokasi Blok Permukiman Kelurahan Babakan Surabaya	139
Tabel III.19 Kondisi Penyediaan Air Minum di Lokasi Blok Permukiman	142
Tabel III.20 Kondisi Drainase Lingkungan di Lokasi Blok Permukiman	146
Tabel III.21 Kondisi Pengelolaan Air Limbah di Lokasi Blok Permukiman.....	151
Tabel III.22 Kondisi Pengelolaan Persampahan di Lokasi Blok Permukiman ..	155
Tabel III.23 Ketersediaan Alat Proteksi Kebakaran di Lokasi Blok Permukiman	160
Tabel III.24 Legalitas Tanah di Lokasi Blok Permukiman	162

Tabel IV.1	Klasifikasi Permukiman Kumuh	168
Tabel IV.2	Klasifikasi Blok Permukiman Kumuh	169
Tabel IV.3	Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh	172
Tabel IV.4	Prioritas Penanganan Blok Permukiman Kumuh.....	173
Tabel IV.5	Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Blok 7-3 Kelurahan Babakan Surabaya	188



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Bandung	7
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Kiaracondong	8
Gambar 1.3 Bagan Kerangka Teori	15
Gambar 2.1 Tipe-Tipe Pola Permukiman	22
Gambar 2.2 Pola Permukiman Mengikuti Jalur Jalan Raya	23
Gambar 2.3 Visualisasi Pola Permukiman Mengikuti Jalur Jalan Raya	23
Gambar 2.4 Visualisasi Pola Permukiman Mengikuti Rel Kereta	24
Gambar 2.5 Visualisasi Pola Permukiman Mengikuti Alur Sungai	24
Gambar 2.6 Pola Permukiman Mengikuti Garis Pantai	25
Gambar 2.7 Visualisasi Pola Permukiman Mengikuti Alur Sungai	25
Gambar 2.8 Pola Permukiman Terpusat	26
Gambar 2.9 Visualisasi Permukiman Terpusat	26
Gambar 2.10 Pola Permukiman Mengelilingi Fasilitas Tertentu	26
Gambar 2.11 Visualisasi Permukiman Tersebar	27
Gambar 2.12 Ilustrasi Gejala Faktor Penarik Dan Faktor Pendorong	40
Gambar 2.13 Aspek Penting Dalam Pembangunan Perkotaan	42
Gambar 3.1 Visualisasi Permukiman Kumuh Pinggiran Sungai di Kota Bandung	108
Gambar 3.2 Peta Sebaran Permukiman Kumuh SK Permukiman Kumuh Kota Bandung	109
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Penduduk di Kecamatan Kiaracondong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	112
Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Penduduk di Kecamatan Kiaracondong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	113
Gambar 3.5 Peta Administrasi Kecamatan Kiaracondong	114
Gambar 3.6 Peta Kepadatan Penduduk Kecamatan Kiaracondong	115
Gambar 3.7 Peta Perbandingan Kondisi Permukiman	122
Gambar 3.8 Peta Blok Permukiman	123
Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong	

Tahun 2107.....	125
Gambar 3.9 Peta Administrasi Kelurahan Babakan Surabaya.....	130
Gambar 3.10 Peta Kepadatan Penduduk Blok Permukiman.....	131
Gambar 3.11 Peta Rencana Pola Ruang.....	132
Gambar 3.12 Peta Kesesuaian Tata Ruang di Lokasi Blok Permukiman	133
Gambar 3.13 Peta Kondisi Bangunan di Lokasi Blok Permukiman.....	138
Gambar 3.14 Kondisi Jalan di Lokasi Blok Permukiman.....	141
Gambar 3.15 Kondisi Jaringan Air Minum pada Blok Permukiman.....	145
Gambar 3.16 Peta Kondisi Drainase di Lokasi Blok Permukiman.....	150
Gambar 3.17 Peta Kondisi Jaringan Air Limbah Pada Blok Permukiman.....	154
Gambar 3.18 Peta Kondisi Persampahan Pada Lokasi Blok Permukiman	159
Gambar 4.1 Kerangka Analisis.....	166
Gambar 4.2 Peta Klasifikasi Blok Permukiman Kumuh	171
Gambar 4.3 Peta Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh.....	175
Gambar 4.4 Peta Penanganan Blok Permukiman Kumuh	176
Gambar 4.5 Peta Lokasi Prioritas Terpilih Penanganan Permukiman Kumuh...	177
Gambar 4.6 Peta Lokasi Prioritas Terpilih Penanganan Permukiman Kumuh...	178
Gambar 4.7 Peta Profil Lokasi Prioritas Terpilih Penanganan Permukiman Kumuh	183
Gambar 4.8 Peta Profil Lokasi Prioritas Terpilih Penanganan Permukiman Kumuh	184

Gambar 4.9 Peta Penanganan Permukiman Kumuh (Relokasi)

Sub Blok 7-3 A.....185

Gambar 4.10 Peta Penanganan Permukiman Kumuh (Peremajaan)

Sub Blok 7-3 B.....186



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk kota – kota di Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius, diantaranya tumbuh kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah merupakan suatu kondisi kawasan permukiman yang tata letak bangunannya tidak teratur, halamannya yang sempit dan langsung berbatasan dengan jalan, bangunan yang berdempet serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan aspek sosial, permukiman kumuh ditandai dengan penambahan penduduk yang tinggi, tingkat pendapatan dan kesehatan yang rendah. (Budi Prayitno 2014 : 17)

Pada dasarnya kemunculan kawasan permukiman kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa (*non urban*) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangnya lahan produktif. Kedua faktor tersebut mempengaruhi keinginan penduduk desa untuk berpindah ke kota yang menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah, yang berawal dari rendahnya pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki. Kondisi ini mendorong timbulnya kawasan permukiman di daerah perkotaan.

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di kota – kota besar dan berkembang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah baik ditinjau dari aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Kondisi ini disebabkan oleh adanya budaya masyarakat yang suka hidup mengelompok dan kurang memperhitungkan ruang – ruang untuk fasilitas penunjang kawasan permukiman dalam melakukan pembangunan rumah. Akibatnya kawasan yang terbangun tidak memperhatikan aspek keruangan, lingkungan dan sosial yang berimplikasi memberikan gambaran suatu kawasan permukiman yang kumuh. Pada umumnya

daerah – daerah kumuh terbentuk sejalan dengan proses perkembangan dan pemadatan lingkungan kota. Lingkungan kumuh tidak hanya memberikan efek visual yang buruk, juga memberikan kontribusi yang tidak baik bagi perkembangan fisik kota secara umum serta hanya membantu penduduk untuk sekedar tinggal tanpa memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang positif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan (Penyusunan Program Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan), teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung berada di 442 RW yang tersebar di 33 kecamatan. Berdasarkan hasil kajian yang ada, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota Nomor 648/Kep.286-distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman kumuh di Kota Bandung. Berdasarkan tingkat kekumuhannya, permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan tinggi terdapat pada lima kecamatan yakni pada Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Keracondong dan Kecamatan Sumur Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan program-program terkait dalam usaha perbaikan permukiman kumuh, diantaranya adalah program peningkatan sarana dan prasarana permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman

Masalah permukiman kumuh dialami juga oleh Kota Bandung, sebagai ibukota propinsi Jawa Barat khususnya di Kelurahan Babakan Surabaya. Perkembangan permukiman kumuh di Kelurahan Babakan Surabaya sangat pesat sehingga perlu diantisipasi, apalagi kota ini merupakan pusat perdagangan dan jasa diharapkan dapat memberikan citra kota yang ideal bagi masyarakat Kota Bandung pada umumnya dan khususnya masyarakat Babakan Surabaya. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terutama fasilitas sarana dan prasarana masyarakat seperti perumahan, pelayanan sosial, transportasi, air bersih dan lain – lain. Pemerintah daerah telah melakukan langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di beberapa tempat di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah memutuskan dan

menetapkan untuk melaksanakan upaya pengembangan ruang fisik kota dan peningkatan kualitas prasarana fisik Kota Bandung secara bertahap.

Menurut data yang ada, Kelurahan Babakan Surabaya terdapat 10 RW yang termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh. Padatnya lingkungan permukiman kumuh yang tumbuh di sepanjang tepi sungai, menimbulkan dampak lingkungan dengan kondisi yang sangat buruk dan sisi lain menyebabkan timbulnya bahaya yang sangat rawan terhadap kebakaran. Jika dilihat perumahan dan permukiman di sepanjang bantaran sungai, khususnya di Kelurahan Babakan Surabaya pada umumnya penduduk menempati rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, bangunan rumah rawan terhadap kebakaran, tidak berjarak satu dengan yang lain, kurangnya kualitas sarana pembuangan sampah, Drainase, dan jaringan air bersih yang ada.

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan iklim yang kondusif agar penduduk lebih cepat dapat menempati rumah yang layak huni. Pada saat ini Pemerintah Daerah belum mampu untuk mengidentifikasi dan mengukur kemampuan memperbaiki atau membangun rumah dari penduduk kota. Ketidakmampuan ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk membantu penduduk memperbaiki atau membangun rumah. Masih sangat sedikit program pemerintah daerah yang dilakukan untuk membantu memperbaiki atau memugar rumah penduduk pada kawasan permukiman kumuh perkotaan khususnya di Kelurahan Babakan Surabaya. Usaha pemugaran perumahan di kawasan permukiman kumuh sangat diperlukan karena tidak semua penduduk mampu membeli atau memiliki rumah yang dibangun oleh Perumnas atau pengembang. Kalaupun ada yang mampu, mereka lebih senang mendiami rumah di kawasan permukiman tersebut (kumuh) karena kedekatan dengan pusat – pusat pelayanan ataupun ke tempat penting.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas perlu dilakukan suatu kajian mengenai “Kajian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan” sebagai solusi penanganan permukiman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maka permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya saat ini yang paling menonjol adalah masih adanya permukiman yang kurang layak yang ditempati masyarakat, hal ini diakibatkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat karena dominasi mata pencaharian warga adalah sebagai buruh swasta, sehingga untuk mengandalkan pekerjaan tersebut sangat sulit dapat mensejahterakan (Hasil Observasi, 2017). Selain itu tingginya harga lahan yang berimplikasi pada ketidakmampuan untuk membangun rumah yang layak, disisi lain tuntutan lokasi rumah yang harus dekat dengan tempat bekerja, maka banyak yang tidak mempedulikan penataan ruang seperti masih banyak yang membangun permukiman di sempadan sungai, sehingga akibatnya menambah kesan kekumuhan pada wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut diantaranya meliputi :

- Kebiasaan masyarakat melakukan pembangunan rumah tanpa aturan sehingga tata letak bangunan tidak teratur dan halamannya sempit serta kurang mempertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan, seperti cahaya matahari, sirkulasi udara, sanitasi, dan lain-lain. Dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan sangat rendah terutama yang kegiatan usahanya di sektor informal yang jam kerjanya tidak tentu.
- Kepadatan perumahan relatif tinggi dengan kondisi bangunan buruk, rawan terhadap kebakaran dan pola penggunaan lahannya tidak teratur serta kurangnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Melihat dari permasalahan – permasalahan yang ada diatas, maka timbul pertanyaan yang dapat dijadikan bahan studi dalam penyusunan tugas akhir ini, yakni **“Bagaimana Pola Penanganan Permukiman Kumuh Yang Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan Yang Ada?”**

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan

Melihat latar belakang dan permasalahan yang mendasari pemikiran dalam penulisan studi ini mempunyai tujuan yaitu untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi landasan penanganan kawasan permukiman rumah kumuh di Kota Bandung, tepatnya di wilayah Babakan Surabaya untuk mewujudkan wilayah yang nyaman secara fisik, aman dari bencana, dan layak untuk hidup (Livable), serta berkelanjutan secara lingkungan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang harus dicapai dalam mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- Teridentifikasinya tipologi kekumuhan di Kelurahan Babakan Surabaya
- Teridentifikasinya tingkat kekumuhan di Kelurahan Babakan Surabaya
- Teridentifikasinya lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh di lokasi blok permukiman Kelurahan Babakan Surabaya
- Teridentifikasinya pola penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan di wilayah penelitian.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian bidang perencanaan wilayah dan kota terdapat dua macam ruang lingkup yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan ruang lingkup yang bersifat spasial atau keruangan secara fisik yang menjadi objek studi penelitian dengan batasan administratif. Ruang lingkup materi atau substansi lebih difokuskan kepada substansi atau materi-materi lain yang berhubungan dengan tema yang diambil.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

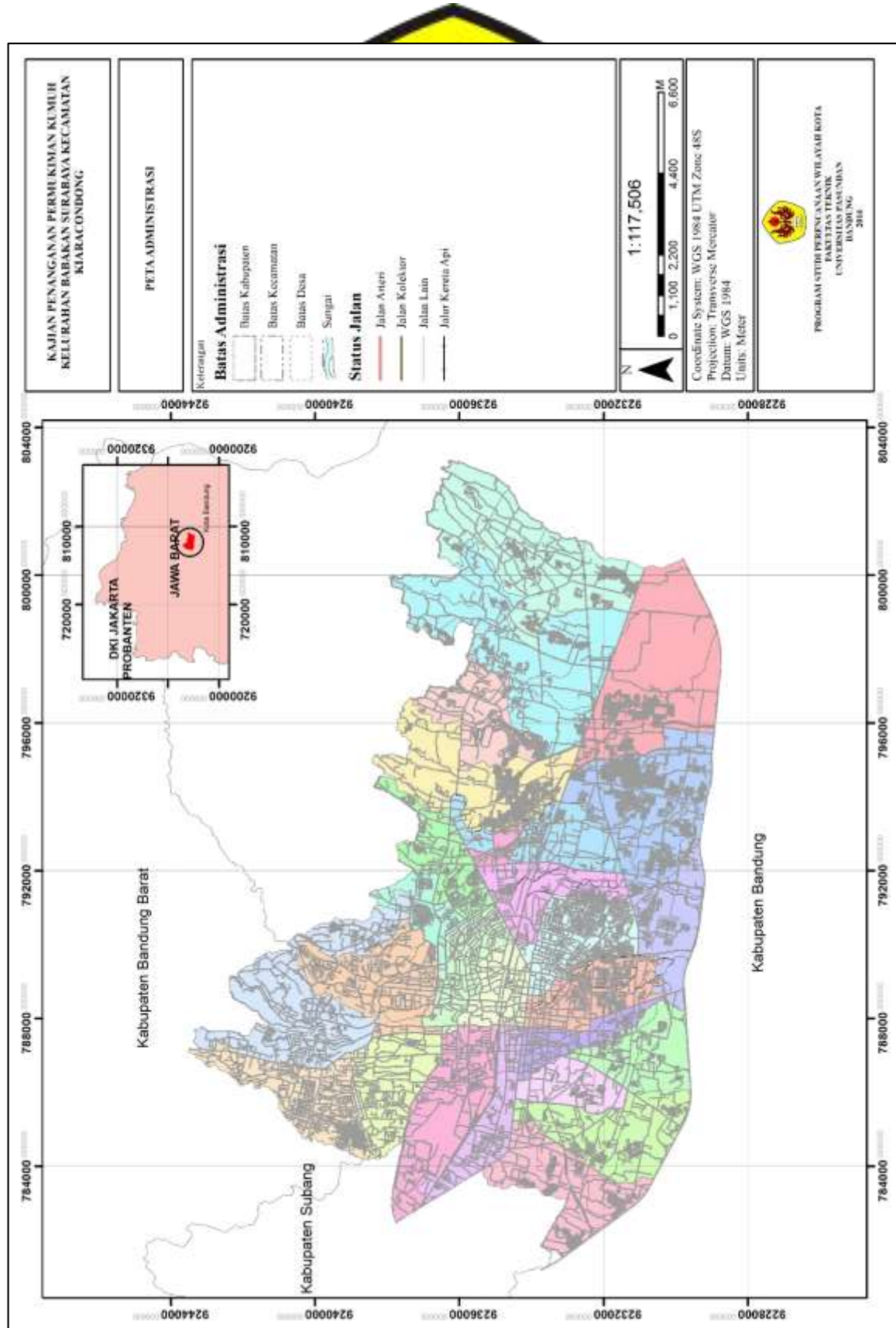
Pada penelitian ini, fokus wilayah yang diamati merupakan Kawasan Permukiman yang mempunyai tingkat kepadatan dan kekumuhan tinggi, adapun ruang lingkup wilayahnya yaitu Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu nama wilayah Kecamatan dari 30 wilayah Kecamatan yang ada di Kota Bandung. Luas Kecamatan Kiaracondong sekitar 6,13 KM persegi. Secara Topologi Kecamatan Kiaracondong berada pada ketinggian sekitar 681 DPL (Diatas Permukaan Laut), dan berdasarkan astronomis Kecamatan Kiaracondong terletak diantara $66^{\circ}54,00 - 65^{\circ} 7,00$ Lintang Selatan Dan $107^{\circ}38.24 - 107^{\circ}40.12$ Bujur Timur. Dengan keadaan letak geografis tersebut, Kecamatan Kiaracondong mempunyai batas batas wilayah sebagai berikut :

Kini Babakan Surabaya Kota Bandung memiliki kepadatan penduduk tetap 21,555 jiwa/Ha, perlu diingat bahwa banyak penduduk yang belum tercatat karena banyak dari sebagian penduduk yang membuka tempat kost dan menyewakan sebagian dari rumahnya.

Secara Administratif, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong dibatasi oleh :

- Utara : Kecamatan Cibeunying Kidul
- Selatan : Kelurahan Babakan Sari dan Kecamatan Buah Batu
- Timur : Kelurahan Cicaheum dan Kecamatan Batununggal
- Barat : Kecamatan Antapani dan Buah Batu

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Bandung



1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang Lingkup Substansi adalah penjelasan batasan materi yang dilakukan dalam penelitian. Berikut materi yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Mengidentifikasi lokasi Kawasan Kumuh Permukiman di Kelurahan Babakan Surabaya, dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh dengan indikator sebagai berikut :
 - a) Aspek Kondisi Kekumuhan
 - Kondisi Bangunan Gedung
 - Kondisi Jalan Lingkungan
 - Kondisi Penyediaan Air Minum
 - Kondisi Drainase Lingkungan
 - Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - Kondisi Alat Proteksi Kebakaran
 - b) Aspek Legalitas Tanah
 - Kejelasan status Tanah
 - Kesesuaian Tata Ruang
 - c) Aspek Pertimbangan Lain
 - Nilai Strategis Lokasi
 - Kepadatan Penduduk
 - Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya
2. Mengidentifikasi dan menganalisis tipologi kekumuhan permukiman Kelurahan Babakan Surabaya untuk menentukan klasifikasi kekumuhan dari terparah sampai ke rendah, sehingga dapat menentukan prioritas penanganan permukiman kumuh, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

3. Merumuskan penanganan permasalahan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar permukiman, dalam hal ini tentunya mempertimbangkan :
 - Kesesuaian Tata Ruang
 - Hasil Tipologi Kekumuhan
 - Variabel Tipologi Kekumuhan

1.5 Batasan Studi

Dalam penelitian ini, memiliki batasan studi, dimana lokasi pengamatan adalah permukiman kumuh yang terdapat di Kota Bandung, namun lokasi penelitian yang diambil hanya di Kelurahan-kelurahan yang memiliki beberapa kriteria kuat, yaitu yang memiliki permukiman kumuh berdasarkan observasi sebelumnya, dimana dari kelurahan-kelurahan tersebut, terdapat satu lokasi yang dijadikan sebagai wilayah penelitian yaitu kawasan permukiman Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong.

Selain itu dalam hal substantif, untuk analisis tipologi kekumuhan, variabel yang diidentifikasi hanya meliputi aspek fisik. Sedangkan untuk aspek non fisik tidak diperhitungkan dalam indikatornya, seperti dilihat dari dekat tidaknya permukiman dengan sumber ekonomi, dan pusat kegiatan kota sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum tahun 2006 karena dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 hanya menitik beratkan pada aspek fisik seperti: Kondisi bangunan, jaringan jalan, drainase, sistem persampahan, air limbah, air bersih, legalitas tanah dan juga kepadatan penduduk.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan metode untuk melakukan kajian kekumuhan permukiman, di mana metodologi yang dilakukan terdiri atas metode pendekatan studi, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

1.6.1 Metode Pendekatan

Untuk mencapai tujuan dalam studi ini, maka dibuat kerangka pendekatan yaitu berawal dari potensi dan permasalahan wilayah dengan batasan studi berupakajian tipologi kekumuhan permukiman di Kawasan Babakan Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penerapan kerangka metode penelitian dalam mengumpulkan informasi dari berbagai aspek, di mana informasi yang telah diperoleh dapat digunakan lagi untuk kepentingan selain penelitian tersebut. Penelitian mengenai Kajian Tipologi Kekumuhan Permukiman di Kawasan Kelurahan Babakan Surabaya pada dasarnya adalah merupakan studi kasus pada suatu kawasan dengan melakukan analisa data sekunder dan primer dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perumusan definisi permukiman kumuh;
- 2) Perumusan variabel, parameter dan data;
- 3) Pengumpulan data sekunder dan primer yang relevan;
- 4) Membuat komparasi dan interpretasi data yang didapat ;
- 5) Membuat analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif tentang data yang diperoleh untuk menentukan lokasi kumuh berdasarkan analisis variabel dan parameter yang telah ditetapkan, dan menentukan tipologi permukiman kumuh;
- 6) Menentukan rekomendasi penanganan permukiman kumuh di kawasan Babakan Surabaya

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ini amat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan harus cukup akurat untuk digunakan. Keakuratan data tersebut dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan data tersebut cukup akurat. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu dengan dua (2) cara, meliputi :

a. Survei Primer

Survei primer yaitu survei yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengamati sarana dan prasarana yang ada yang menjadi sasaran penelitian. Dalam survei primer ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- Observasi Lapangan, merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan, atau dengan kata lain yaitu pengambilan data dengan cara mengamati langsung daerah yang dikaji. Dimana data yang di observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel kekumuhan, seperti kondisi fisik bangunan, kondisi sarana prasarana, dan kondisi fisik pesisir, serta penanganan fisik bangunan untuk abrasi dari pemerintah yang sudah dilakukan.
- Wawancara, yaitu proses pengambilan data atau dengan kata lain merupakan cara pengamatan untuk dapat memperoleh keterangan dimana dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang terkait. Wawancara ini dilakukan kepada tokoh-tokoh dan pemerintah yang terkait dengan penelitian ini, seperti kepala desa, RT, RW, camat, bappada, PU Ciptakarya, dll. Dimana pertanyaan yang diajukan terkait dengan kondisi eksisting dan arahan yang akan dilakukan atau diinginkan seperti variabel dominasi status tanah dan bangunan, komitmen pemerintah dalam indikasi pembiayaan, kelembagaan, rencana, pembenahan fisik dan kawasan.

b. Survei sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu melalui studi pustaka atau studi literatur dengan cara mengkaji sumber teoritis berupa jurnal-jurnal, *text book*. Literatur yang digunakan antara lain yang memuat teori tentang permukiman kumuh, penanganan kawasan kumuh, relokasi, penataan kawasan, dan kajian lain yang terkait.

Survei instansi juga dilakukan untuk mendapatkan data-data melalui instansi-instansi terkait seperti instansi pemerintahan setempat. Data-data berupa dokumen yang diperoleh tersebut kemudian akan ditelaah dan diinterpretasikan. Pengumpulan data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer yang diperoleh dari lapangan. Instansi pemerintahan yang akan ditinjau ialah

Bappeda (Badan Pengawasan & Perencanaan Daerah), BPS (Badan Pusat Statistik), BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas Pekerjaan Umum, dan pemerintah setempat/lokal, dan lain-lain, yang mana data yang didapat adalah untuk mengidentifikasi, tutupan lahan, kesesuaian tata ruang, kondisi kependudukan, vitalitas ekonomi, serta status tanah dan bangunan

1.6.3 Metode Analisis

Metode analisis diperlukan dalam analisis data penelitian. Metode analisis menjelaskan mengenai teknik analisis data. Analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Deskriptif Kuantitatif.

1. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan data-data yang ada sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi yang tengah terjadi di lapangan

2. Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan **metode analisis deskriptif kuantitatif**, metode ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dimana dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menentukan tipologi kekumuhan permukiman, yang mana penilaian dilakukan dengan teknikskoring pada masing-masing kriteria yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

a) Penentuan Permukiman Kumuh

yaitu dengan teknik skoring berdasarkan variabel dan indikator yang ditetapkan pada UU No. 1 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016. Dengan indikator sebagai berikut :

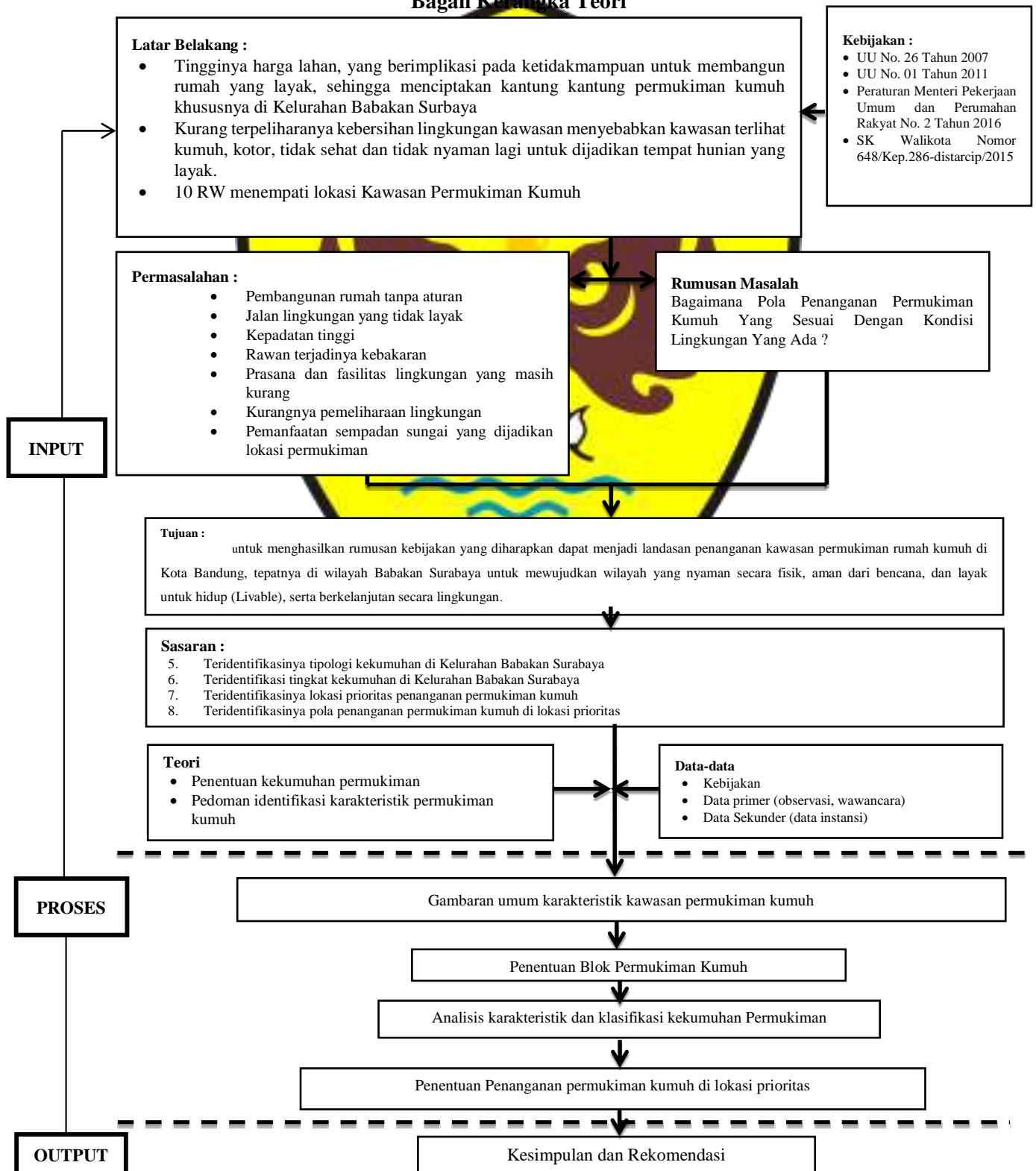
- Aspek Kondisi Kekumuhan
 - Kondisi Bangunan Gedung
 - Kondisi Jalan Lingkungan
 - Kondisi Penyediaan Air Minum
 - Kondisi Drainase Lingkungan
 - Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - Kondisi Alat Proteksi Kebakaran
- Aspek Legalitas Tanah
 - Kejelasan status Tanah
 - Kesesuaian Tata Ruang
- Aspek Pertimbangan Lain
 - Nilai Strategis Lokasi
 - Kepadatan Penduduk
 - Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya



1.6.4 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari proses penyusunan materi studi ini, yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3
Bagan Kerangka Teori



1.7 Sistematika Penyusunan

Sistematika dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, kerangka metode analisis, serta sistematika penyajian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian penelitian yang ditinjau dari tinjauan teori – teori yang ada atau kajian pustaka yang berkaitan dengan aspek tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum wilayah dan juga mengenai permukiman yang ada yang akan menjadi data/informasi awal dalam memahami karakteristik potensi dan permasalahan di Kelurahan Babakan Surabaya

BAB IV ANALISIS

Berisikan tentang analisis yang digunakan dalam menganalisis kelayakan permukiman

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pekerjaan seluruh bab dan memperoleh output yang berupa suatu saran yang akan disampaikan sebagai masukan atau rekomendasi terhadap pengembangan wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Kuswartojo, Tjuk, dkk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: ITB
- Sastra, Suparno, dkk. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Prayitno, Budi. 2014. *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Salmah, Sjarifah. 2010. *Penataan Bantaran Sungai Ditinjau Dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Menejemen Kota Dan Wilayah*. Bandung: Sinar Grafika Offset
- Kaiser, Edward J, dkk. 1995. *Urban Land Use Planning*.
- Budiharjo, Eko. 1984. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung.

B. Terbitan Terbatas

- Republik Indonesia. 2013. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2013 – 2033. Lembar Daerah Kota Bandung. No 03 Seri D. Sekretariat Daerah Kota Bandung. Bandung
- Republik Indonesia. 2015. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2015 – 2035. Lembar Daerah Kota Bandung. No Reg 242. Skretariat Daerah Kota Bandung. Bandung
- Republik Indonesia. 2015. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Bandung Tahun 2015. Lembar Daerah Kota Bandung. No 235. Sekretariat Daerah Kota Bandung. Bandung
- Kota Bandung. 2016. Statistika Kota Bandung Tahun 2016. No Publikasi 3273.6201. BPS Kota Bandung. Bandung
- Kota Bandung. 2016. Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2016. No Publikasi 2538. BPS Kota Bandung. Bandung
- Kecamatan Kiaracondong Dalam Angka Tahun 2016

Monografi Kelurahan Babakan Surabaya Tahun 2016

C. Kajian Studi

Syafni, Rian. 2003. "Pandangan Masyarakat Terhadap Usaha Perbaikan permukiman kumuh di Bantaran Sungai Cikapundung". Skripsi. Institut Teknologi Bandung

Dwiputri, Irdhania. 2009. "Pemilihan Program Peremajaan yang Sesuai Untuk Penyelesaian Persoalan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung". Skripsi. Institut Teknologi Bandung

Umbara, Andy rizal. 2003. "Kajian Relokasi Permukiman Kumuh Nelayan Ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Sukamaju". Skripsi. Universitas Diponegoro

Ningsih, Sri Tusnaeni. 2014. "Kajian Tipologi Kekumuhan Permukiman Pesisir Di Kawasan Rawan Abrasi Kabupaten Indramayu". Skripsi. Universitas Pasundan

Erwin. 2013. "Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Pusat Kota Bandung Kelurahan Nyengseret". Skripsi. Universitas Pasundan

D. Undang-Undang dan Peraturan

Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007. No 68. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. Undang – Undang No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2007. No 7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No 320. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Menteri Negara Perumahan Rakyat. Jakarta

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Berita Negara RI Tahun 2016. No 172. Kepala Biro Hukum. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman

E. Website

<http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/kumuh/main.php?module=home.Htm//>.

(Diakses 2/06/2017)

<http://smeaker.com/nasional/4919/foto-kinclongnya-kali-ciliwung-di-fb-propagandakah/>

(Diakses 3/05/2017)

<http://galeripustaka.com/2017/06/penentuan-batas-wilayahsungai.html/>

(Diakses 3/07/2017)

http://bbc.co.uk/bitesize/ks3/geography/interdependence/population_migration/revision/6/. (Diakses 3/06/2017)

http://medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2017/05/09/59006/benahi_permukiman_kumuh_melalui_plp2k-bk. (Diakses 3/06/2017)

<http://perencanaankota.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-teori-evaluasi-dalam.html/>. (Diakses 24/05/2017)

http://Study_Kajian_Teori_Perumahan_Dan_Permukiman.Htm//. (Diakses 04/06/2017)

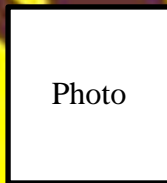
http://Bhyouzha_Pemukiman_Penduduk.Htm//. (Diakses 20/06/2017)

http://Get_To_Know_Planologi_Closely_Juni_2012.Htm//. (Diakses 20/06/2017)

http://Muhammad_Fauzi_Arkan_Kriteria_Pemukiman_Yang_Layak_Huni.Htm//. (Diakses 20/06/2017)

http://Narera_Pengertian_Pemukiman.Htm//. (Diakses 20/06/2017)

**KAJIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG**



Nama : Arie Ramadhan Wijaya

Nrp : 103060019

Mengetahui/ Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

(DR. Ir. Firmansyah, MT)

Ir. Jajan Rohjan, MT

**KAJIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN BABAKAN SURABAYA KOTA BANDUNG**



**Disusun Oleh :
Arie Ramadhan Wijaya
103060019**

Bandung, Februari 2018

Menyetujui:

DR. Ir. Firmansyah, MT	(Pembimbing Utama)	:
Ir. Jajan Rohjan, MT	(Co. Pembimbing)	:
Ratih Rantini, ST., MT	(Penguji)	:
Apriadi Budi Raharja, ST., M.Si	(Penguji)	:
Ir. Jajan Rohjan, MT	(Ketua Sidang)	:

Mengetahui:

Koordinator Tugas Akhir

Ketua Program Studi

(DR. Ir. Firmansyah, MT)

(Ir. Reza M Surdia, MT)